



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA, RISTEKDIKTI , BADAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN
NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2015 – 2016.
Masa Persidangan ke-	: I (satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum.
Dengan	: Ketua Badan Perfilman Indonesia.
Hari/Tanggal	: Senin, 07 September 2015.
Pukul	: 13.00 – 15.50 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Dr. Abdul Kharis Almasyhari/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Menerima aspirasi mengenai kurangnya jumlah institusi pendidikan film di Indonesia; 2. Menerima aspirasi agar industri perfilman dijadikan lokomotif industri kreatif di bawah Badan Ekonomi Kreatif; 3. Lain-lain.
Hadir	: 32 dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI/ Dr. Abdul Kharis Almasyhari, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum sesuai Pasal 246 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI.

II. CATATAN RAPAT.

1. Komisi X DPR-RI memberikan apresiasi atas penjelasan dari Badan Perfilman Indonesia (API), Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI), *Indonesian Film Directors Club* (IFDC), Asosiasi Industri Video Indonesia (AIVI), Patriot Film Indonesia, Alumni Institut Kesenian Jakarta, Persatuan Produser Film Indonesia (PPFI), Komunitas Penulis Skenario dan Sutradara Indonesia (KPSSI), Persatuan Artis Sinetron Indonesia (PARSI), dan Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GBPI).

2. Masyarakat industri perfilman nasional menyampaikan aspirasi dan mengusulkan beberapa hal mengenai:
 - a. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah dalam mendorong dan meningkatkan pertumbuhan industri perfilman nasional, sehingga diperlukan koordinasi dan pembagian kerja yang jelas antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Pariwisata RI, dan Badan Ekonomi Kreatif dalam menangani industri perfilman nasional.
 - b. Perlunya peninjauan kebijakan sensor film oleh Lembaga Sensor Film (LSF) agar berada pada koordinasi Komisi X DPR RI yang menangani kebudayaan bukan kepada Komisi I DPR RI yang menangani masalah pertahanan/keamanan.
 - c. Perlunya peninjauan kembali terhadap UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman yang diikuti oleh penyesuaian peraturan pemerintah maupun peraturan menteri yang mengatur tentang industri perfilman nasional.
3. Komisi X DPR RI menindaklanjuti aspirasi tentang keberadaan Lembaga Sensor Film (LSF) sebagai mitra kerja Komisi X DPR RI yang menangani kebudayaan, pendidikan, pariwisata dan ekonomi kreatif, dan segera mengusulkannya kepada Pimpinan DPR RI.
4. Melihat banyaknya permasalahan dalam industri perfilman nasional, Komisi X DPR RI mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) tentang perfilman nasional agar dapat merekomendasikan penyelesaian permasalahan perfilman nasional secara lebih konkrit kepada Pemerintah.
5. Komisi X DPR RI akan membawa catatan rapat ini pada pertemuan Rapat Kerja dengan Kemendikbud RI, Kemenpar RI dan Badan Ekonomi Kreatif yang akan datang.

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 15.50 WIB.

KETUA,



DR.H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI